

IDENTITAS ETNIS TIONGHOA PADANG MASA PEMERINTAH HINDIA BELANDA

PADANG'S ETHNIC CHINESE IDENTITY DURING DUTCH EAST INDIES PERIOD

Erniwati

Universitas Negeri Padang.

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota Padang.

e-mail: erniwaitinur@fis.unp.ac.id

Naskah Diterima: 8 Januari 2019

Naskah Direvisi: 13 Juni 2019

Naskah Disetujui: 28 Juni 2019

DOI: 10.30959/patanjala.v1i12.482

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang identitas etnis Tionghoa yang ada di Padang pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Mengkonstruksi identitas etnis Tionghoa di Padang menggunakan metode sejarah melalui studi pustaka dan arsip dengan menelusuri sumber-sumber berupa buku, arsip Pemerintah Hindia Belanda, dokumen perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman Heng Beng Tong serta Hok Tek Tong. Data yang diperoleh kemudian dikritik dan dikronologiskan untuk menghasilkan karya historiografi. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa identitas etnis Tionghoa di Padang masa Pemerintah Hindia Belanda dipengaruhi oleh penataan masyarakat di daerah koloni oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan sistem pemukiman (wijkenstelsel), pembagian masyarakat melalui Indische Staatregeling serta berbagai aturan lainnya. Penerapan sistem tersebut membentuk identitas etnis Tionghoa di Padang di mana secara politis berada di bawah kontrol Pemerintah Hindia Belanda, namun secara social dan budaya masih berorientasi kepada kebudayaan Tionghoa.

Kata kunci: etnis Tionghoa, identitas, Padang, Pemerintah Hindia Belanda.

Abstract

This article aims to explain the Chinese in Padang during the Dutch East Indies government. Constructing a Chinese identity in Padang use historical methods through library studies and archives by tracing sources such as books, Dutch East Indies government archives, documents on social and funeral associations Heng Beg Tong and Hok Tek Tong. The data obtained, critical and chronologist to produce historiography works. The findings of this article indicate that the ethnic Chinese identity in Padang during the Dutch East Indies government by implementing settlement system (wijkwnstelsel), classification of communities through the Indische Staatregeling and other rules. The implementation of the system formed a Chinese ethnic identity in Padang where it was politically under the control of the Dutch East Indies government, but socially and culturally still oriented to Chinese culture.

Keywords: Chinese ethnic, identity, Padang, Dutch East Indies Government.

A. PENDAHULUAN

Tionghoa adalah suatu etnis yang telah menjadi bagian dari kebhinekaan di Indonesia yang hadir jauh sebelum datangnya bangsa Barat. Istilah etnis Tionghoa digunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang Tionghoa yang tinggal

di luar daratan Tiongkok (*Chinese Oversease*). Istilah “Tionghoa” lahir dari gerakan kebudayaan yang dipelopori oleh Tiong Hwa Hwe Koan (THHK) sejak tahun 1900 untuk mempopulerkan istilah “Tionghoa” sebagai pengganti istilah “Chinese” yang digunakan oleh bangsa

Barat dan kata “Chinezen” yang digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda¹.

Keberadaan etnis Tionghoa di hampir di seluruh kota di Indonesia tidak terlepas dari fenomena diaspora yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama oleh orang-orang Tionghoa keluar dari daratan Tiongkok. Proses diaspora etnis Tionghoa keluar dari daratan Tiongkok didorong oleh faktor interen yang terjadi di Tiongkok dan faktor eksteren tempat mereka yang baru, salah satu daerah diaspora etnis Tionghoa adalah kota-kota di Nusantara (Indonesia), termasuk Padang.

Hidup sebagai kelompok minoritas di tengah masyarakat Indonesia yang plural menjadi hal yang tidak mudah untuk dijalani etnis Tionghoa di Indonesia. Secara historis, kebijakan Pemerintah Hindia Belanda telah menempatkan etnis Tionghoa sebagai kelompok yang terpisah dan berbeda dari masyarakat tempatan. Sejumlah catatan tindak kekerasan yang menimpa etnis Tionghoa dari berbagai rezim politik di Indonesia menunjukkan bahwa posisi etnis ini sangatlah rentan, baik dalam tataran lokal maupun nasional. Di Indonesia, konflik antara penduduk setempat dengan etnis Tionghoa paling banyak terjadi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lainnya (Suryadinata, 2005: 181). Padahal tindak kekerasan menjadi suatu tragedi yang merusak nilai-nilai humanitas dan meninggalkan ingatan pilu serta trauma, sehingga beberapa etnis Tionghoa akhirnya ada yang memilih meninggalkan Indonesia.

Narasi kekerasan terhadap etnis Tionghoa sebagai masa lalu yang kelam mengisi hampir perjalanan sejarah beberapa kota besar di Indonesia. Fenomena berbeda ditemukan di Padang, etnis Tionghoa menjalani kehidupan yang terjaga tanpa diwarnai dengan konflik

terbuka yang sampai menimbulkan korban jiwa. Padahal dari sisi kuantitas, etnis Tionghoa disebut sebagai kelompok minoritas yang telah berinteraksi dengan masyarakat Padang dalam waktu yang panjang. Pada kenyataannya, dominasi kelompok mayoritas seperti Minangkabau, membuat etnis Tionghoa melebur ke dalamnya, tanpa kehilangan identitas asli mereka (Erniwati, 2003: 70).

Proses adaptasi yang panjang memberikan keunikan tersendiri terhadap masing-masingnya, sehingga ditemukan keberagaman etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Kearifan lokal masing-masing kota di Indonesia akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pembentukan identitas etnis Tionghoa yang tinggal di wilayahnya, seperti etnis Tionghoa Padang akan berbeda dengan etnis Tionghoa yang tinggal di Jawa, Medan, Riau, Makasar, Bangka, dan mereka yang tinggal di daerah lainnya. Akibatnya generalisasi yang selama ini diberikan tentang etnis Tionghoa perlu ditinjau kembali.

Fokus kajian artikel ini adalah dinamika pembentukan identitas etnis Tionghoa di Padang pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Periode ini menjadi landasan pembentukan identitas Tionghoa oleh politik lokal. Di satu sisi, lokalitas Padang yang berfungsi sebagai daerah rantau identik dengan Minangkabau. Meskipun demikian, penduduk Padang sebetulnya sangat beragam karena sifatnya yang terbuka terhadap berbagai pendatang.

Ada beberapa kajian terdahulu yang patut dirujuk sebagai sumber acuan. Pertama adalah buku yang berjudul *Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota* karya Freek Colombijn yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh penerbit Ombak. Buku ini mengulas mengenai keberadaan etnis Tionghoa yang menjadi bagian dari penduduk Padang. Colombijn melihat bagaimana kontribusi etnis Tionghoa dalam bidang perdagangan, terutama

¹ Lihat lebih lanjut Erniwati, 2016, *140 Tahun Heng Beng Tong: Sejarah Perkumpulan Tionghoa 1876-2016*, Depok: Komunitas Bambu, hlm. 1.

tentang pemanfaatan ruang Padang sebagai wilayah budaya, pusat perdagangan, pemerintahan, transportasi, dan pendidikan sejak Pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi konflik antarsesama pengguna ruang, maka *master plan* dibutuhkan agar ruang untuk penggunaan umum dan simbolik yang memberikan ciri khas Padang bisa digunakan dengan baik.

Penelitian Colombijn tersebut berguna untuk memberi pemahaman tentang Padang sebagai suatu wilayah lokalitas dengan kedinamisan yang kentara, terutama dalam penggunaan konsep ruang pada kemajemukan masyarakat yang berada di dalamnya. Kelompok etnis Tionghoa sebagai minoritas yang mempertahankan eksistensinya dalam berbagai bidang, terutama bidang perekonomian. Persaingan dagang antara etnis Tionghoa dengan Minangkabau disandingkan dengan pembangunan eksistensi diri untuk mendapatkan tempat tersendiri dalam ruang Padang. Meskipun etnis Tionghoa digambarkan oleh Colombijn berusaha untuk mendapatkan ruang di Padang, namun dinamika kebudayaan berdasarkan situasi politik yang tidak tetap di tataran lokal maupun nasional, tidak tergambarkan dalam penjelasannya. Inilah yang menjadi pembeda antara tulisan Colombijn dengan tulisan ini.

Selanjutnya, dua karya yakni *Menjadi Jawa: Orang-orang Cina dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895-1998* karya Rustopo dan *The Chinese of Semarang: A Changing Minority Community in Indonesia* karya Willmott. Dua karya ini merupakan hasil penelitian disertasi yang telah dipublikasikan. Willmott melihat masa lalu etnis Tionghoa di Jawa berdasar teori sosio-kultural dari perkembangan secara intelektualitas dan mentalitas kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari secara personal maupun kelompok. Etnis Tionghoa digambarkan sebagai bagian yang membentuk identitas Jawa secara kolektif serta berupaya untuk mencari jati diri dalam pembangunan identitas ke-Jawa-annya. Tulisan ini juga

mencoba menggambarkan bahwa etnis Tionghoa juga memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari “Ke-Jawa-an” tempat mereka berdomisili dan menjadi bagian dari lingkungan tersebut.

Rustopo mampu membangun model penelitian sejarah dengan merekonstruksi karya sejarah kebudayaan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ia memakai teori konvergensi dari William Stern, yakni hasil pertemuan (*konvergensi*) antara faktor pribadi dan lingkungan yang digambarkan pada etnis Tionghoa dalam proses menjadi Jawa pada 1895-1998. Kajian menggunakan silsilah dan faktor lingkungan, mulai dari keluarga, tetangga, hingga budaya. Pola kebudayaan Jawa yang disampaikan Geertz menjadi rujukan dalam mengamati simbol ke-Jawa-an mana yang diadopsi.

Gambaran Rustopo dan Willmott tentang integrasi budaya Jawa dengan identitas etnis Tionghoa memiliki perbedaan dengan etnis Tionghoa di Padang. Pengintegrasian budaya Jawa pada identitas etnis Tionghoa diserap secara individu ataupun kelompok setelah melalui beberapa proses adaptasi pribadi-pribadi yang kemudian men-Jawa-kan diri di Surakarta. Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh lokalitas begitu memengaruhi kepribadian etnis Tionghoa dan mengikuti pola-pola kehidupan setempat. Namun di Padang, etnis Tionghoa tetap menjaga budaya leluhurnya melalui perkumpulan marga, perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT), meskipun pengaruh budaya Minangkabau tidak dapat dipungkiri tetap berdampak pada etnis Tionghoa Padang, seperti bahasa yang digunakan (bahasa Pondok).

HBT dan HTT berpusat di kota Padang serta memiliki beberapa cabang di kota lain di Sumatera Barat, Riau, dan Sibolga. Perkumpulan ini memiliki peran dalam mewariskan dan melestarikan budaya terutama pada upacara kematian dengan menggunakan tradisi leluhur. Etnis Tionghoa di Padang akhirnya mampu

mempertahankan jati diri dalam pluralitas lingkungan hidupnya serta berkontribusi terhadap ranah kebudayaan di Padang.

Untuk menganalisa permasalahan ini, maka digunakan konsep etnisitas dan identitas. Kedua konsep tersebut digunakan karena objek penelitian adalah kelompok etnis yang mempunyai identitas tersendiri yang berbeda dengan etnis lainnya. Kajian terdahulu oleh Barth (1969) dan Wang Gungwu (1985) relevan dengan penelitian ini. Barth memberikan definisi mengenai etnisitas atas dua aspek penting, yakni sebagai unit kebudayaan dan sebagai tatanan sosial (Fredrik Barth, 1969:12-15). Penekanan pandangan Barth tersebut terletak pada pembagian sifat kebudayaan yang memberikan ciri terhadap kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Barth mengungkapkan bahwa etnisitas tidak hanya bergantung pada ras maupun warisan biologis, namun juga ekspresi pada identifikasi rasial atau sentimen-sentimen primordial. Dengan demikian, batas-batas antara kelompok etnis masing-masing terbentuk melalui langkah membangun, mempertahankan, dan melestarikan identitas secara berkelanjutan dengan proses interaksi sosial. Kesimpulannya, identitas adalah hasil dari sebuah konstruksi.

Pembentukan identitas sebenarnya mengalami perubahan seiring perjalanannya dengan pemahaman yang berbeda di setiap tempat. Akhirnya, identitas ada yang bersifat permanen dan ada yang tidak. Identitas permanen terlihat pada konsistensi etnis Tionghoa dari segi kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang diiringi dengan adanya usaha pemeliharaan kebudayaan leluhur, sedangkan identitas tidak permanen adalah perubahan pada sisi keorisinilan yang berubah akibat pengaruh dari luar. Selanjutnya, identitas juga terbentuk melalui representasi budaya yang ditampilkan

Sementara itu, Wang Gungwu memberikan penekanan pada konsep identitas Tionghoa dan identitas ganda pada etnis Tionghoa di Asia Tenggara.

Menurutnya, kesadaran sebagai orang Tionghoa menjadi unsur yang paling penting dan inti dalam etnis Tionghoa dengan memiliki beberapa identitas lain dalam waktu yang bersamaan. Dengan penekanan dimensi waktu, Wang Gungwu memberi kesimpulan bahwa perubahan identitas etnis Tionghoa di Asia Tenggara melalui beberapa tahapan, yakni identitas historis, identitas nasional Tionghoa, identitas nasional lokal, identitas etnis, dan identitas kelas. Masing-masing tahapannya tidak bisa berdiri sendiri, karena pada waktu tertentu, etnis Tionghoa akan menganut lebih dari satu identitas (Wang Gungwu, 1991:13-23).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dengan tujuan melihat gambaran lengkap mengenai identitas Tionghoa Padang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni mencari, menemukan, serta menguji dan melakukan kritik terhadap sumber yang terkumpul. Penelusuran data untuk penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang didukung dengan data perpustakaan dan arsip. Studi perpustakaan dan arsip dilakukan penulis dengan menelusuri literatur di Perpustakaan Nasional Jakarta, *Koninklijk Instituut voor Taal- Land en Volkenkunde* (KITLV) di Kuningan Jakarta, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Studi dokumen dilakukan di Arsip Nasional Jakarta, Arsip Daerah Sumatera Barat, arsip HTT dan HBT. Data yang diperoleh, dikritik secara interen dan ekstern. Pada analisis prosesual, data diklasifikasi berdasarkan kronologisnya dengan tujuan menguraikan dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya identitas etnis Tionghoa Padang. Konsep yang digunakan dan fakta yang terkumpul, nantinya akan digunakan untuk interpretasi secara menyeluruh, sehingga eksplanasi menghasilkan penulisan sejarah yang analitis.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Letak Geografis dan Keadaan Alam Padang

Ada beberapa penjelasan yang dipaparkan mengenai Padang, di antaranya adalah versi Houfman dan Tambo. Houfman adalah seorang wakil Belanda yang ditempatkan di daerah yang belum ditaklukkan oleh Belanda, atau yang disebut juga dengan *Opper Koopman*. Menurutnya, Padang pada masa dahulu merupakan dataran rendah seperti lapangan luas yang dikelilingi oleh Bukit Barisan. Dataran rendah itu digunakan sebagai tempat bermukim bagi para penangkap ikan, pedagang, dan petani garam (Netscheer, 1881: III-V). Selanjutnya menurut Tambo, Padang merupakan hutan lebat yang didiami oleh orang Rupit (Tirau) dari daerah pesisir. Dahulu, seorang Datuk Minangkabau menemukan sebuah pedang yang bertuliskan "*Lailahailallah Moehamad Rasoel Allah*" dengan aksara Arab. Pedang itulah yang akhirnya digunakan sebagai nama Padang (Tanpa Pengarang, 1989: 21).

Secara geografis, Padang berada di tengah Pulau Sumatera pada $0^{\circ} 56^{\circ}$ LS dan 100° BT dengan ketinggian 1 hingga 5 meter dari permukaan laut. Padang yang terletak di pinggiran pantai menyebabkan suhu daerah ini antara 20° sampai 32° C. Luas daratan Padang adalah 694.96 km^2 atau 1,65% bagian dari luas seluruh Provinsi Sumatera Barat. Enam puluh persen (60%) wilayah Padang merupakan daerah perbukitan dan hutan lindung yang membentang dari timur ke selatan kota. Beberapa bukit tersebut adalah Bukit Lampu, Bukit Gado-gado, Gunung Padang, dan lainnya. Padang juga memiliki garis pantai dengan panjang 19.800 meter dengan 19 pulau kecil. Pulau-pulau tersebut di antaranya adalah Pulau Sikuai, Pulau Pisang (besar dan kecil), Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, dan beberapa pulau lainnya.

Dibanding daerah pantai lainnya, Padang memiliki ombak yang lebih tinggi, yakni dengan ketinggian sekitar 130 cm. Keganasan ombak pantai yang terkenal

dengan panggilan *Ombak Puruih* menyebabkan sering terjadi abrasi dengan rata-rata 20 cm/tahun. Dampak dari hal tersebut adalah penyempitan dan pengurangan lahan terjadi setiap tahunnya. Dalam mengatasi hal tersebut, beberapa krip (*riol*) dibangun dengan tujuan untuk memecah ombak (Asnan, 2007: 26-27).

Selain itu di Padang, bermuara 6 sungai besar dan 16 sungai kecil. Sungai-sungai besar adalah Sungai Batang Air Dingin, Sungai Batang Kandis, Sungai Batang Arau, Sungai Pisang, Sungai Kuranji, dan Sungai Batang Timbunan. Sungai terpanjang di antara sungai-sungai tersebut adalah Sungai Batang Arau, yang sering disebut dengan Sungai Padang dengan panjang 25 km dari hulu pada kaki Bukit Barisan dan bermuara di pantai Samudera Indonesia. Muara sungai ini pada masa kemudian menjadi pelabuhan dan pemukiman penduduk.

Padang memiliki letak yang strategis sehingga dataran rendah ini menjadi tujuan banyak orang dari berbagai daerah. Pada periode awal, Padang ditempati penduduk pesisir utara dan selatan Pulau Sumatera. Pemukiman penduduk Padang berawal dari pertumbuhan Muara Padang yang pada mulanya hanya perkampungan kecil yang terletak di Sungai Batang Arau, lalu menjadi pusat perdagangan pada waktu kemudian. Hal ini karena kebutuhan orang Minangkabau untuk berhubungan dengan orang-orang yang berada di luarnya untuk mendapatkan komoditi asing yang tidak terdapat di daerah Minangkabau dan juga untuk menambah pengetahuan mereka.

Pelabuhan Muara kemudian muncul menjadi perkampungan di pinggiran bagian selatan Batang Arau yang masa sekarang dinamakan dengan Seberang Padang. Seperti daerah Minangkabau yang lain, Padang merupakan bagian dari pesisir pantai barat Sumatera di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Tanah Datar. Pemukiman pendatang ini berkembang di bagian seberang Sungai Batang Arau. Pada bagian selatan Sungai Batang Arau merupakan daerah perbukitan yang diberi nama Gunung Padang untuk

bukit yang tinggi dan Gunung Monyet untuk bukit yang lebih rendah atau biasa disebut dengan Bukit Siti Nurbaya. Gunung Monyet yang berada di ujung muara sungai berfungsi untuk melindungi daerah tersebut dari angin laut.

2. Kedatangan Etnis Tionghoa di Padang

Belum ada kepastian yang dipaparkan mengenai kapan kedatangan etnis Tionghoa ke Padang. Merujuk kepada Victor Purcell diketahui bahwa proses masuknya etnis Tionghoa ke Nusantara dikelompokkan ke dalam tiga fase. Fase pertama, adanya hubungan dagang antara Kerajaan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Fase kedua, kedatangan etnis Tionghoa berlangsung pada saat kedatangan Bangsa Eropa, yakni ketika Malaka berperan sebagai bandar dagang terbesar pada abad ke-16 di Asia Tenggara. Fase ketiga, etnis Tionghoa datang ke Nusantara saat berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda.

Fase pertama, kedatangan etnis Tionghoa terjadi melalui hubungan dagang antara Tiongkok dengan Nusantara. Hubungan tersebut terbina dalam hubungan sebagai *Negara Vassal*, karena Tiongkok pada masa itu tidak mengakui adanya *Negara Koloni*. Hal tersebut karena Tiongkok tidak menerapkan bentuk negara koloni, namun daerah yang telah ditaklukkan ditandai dengan sistem upeti yang secara implisit menyatakan daerah tersebut sudah ditaklukkan dan mengakui keberadaan Tiongkok (Wang, 1987: 14-15). Oleh karena itu, tidak bisa dibenarkan jika Nusantara pada masa itu berada di bawah dominasi Tiongkok. Hal itu terlihat dari hubungan yang dibina antara Kerajaan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Mereka bahkan saling berkiriman duta sebagai perwakilan kerajaan yang menandai baiknya hubungan antara Kerajaan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Pengiriman tersebut menunjukkan bahwa ada rasa hormat yang sedang saling ditunjukkan. Duta yang dikirim juga membawa beberapa buah

tangan (Vleming, 1988: 6-9). Fase pertama inilah yang menjadi titik pijak terjalannya hubungan etnis Tionghoa dengan masyarakat di kota-kota pelabuhan di Nusantara. Pada fase ini kedatangan etnis Tionghoa dilakukan dengan cara berkelompok bersama ekspedisi yang dikelola oleh Kerajaan Tiongkok. Ekspedisi-ekspedisi ini dilakukan secara beberapa tahap, seperti ekspedisi Fa-Hsien pada abad 4-5 M dan ekspedisi Cheng Ho pada abad 15 M (Sen, 2010: 83-213). Kedatangan pada fase ini tetap bergantung pada angin Muson, sehingga rombongan ekspedisi membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke Tiongkok. Untuk mengisi waktu rombongan kemudian melaksanakan berbagai aktivitas, salah satunya membina hubungan dagang dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan penemuan arkeologi, terdapat situs kuno di pedalaman Sumatera, yakni sekitar hulu Sungai Batanghari (Situs Rambahan) berupa benda-benda peninggalan yang dibawa dari Tiongkok, seperti keramik Rajakula, yang bersal dari masa Dinasti Han (abad 5-6 M) dan Dinasti Tang (abad 7-8 M). Kala itu Pulau Sumatera dinamai dengan *Cin-Cou* (Benua Emas) oleh para pedagang yang berasal dari Tiongkok karena banyak emas yang dihasilkan dari wilayah ini, terutama Minangkabau. Hal inilah yang menjadi daya tarik kedatangan pedagang Tiongkok untuk datang ke Minangkabau. Mereka melakukan perjalanan melalui jalur sungai dan membuat pos-pos penampungan, sehingga muncullah pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi dengan cara barter komoditi ekspor dengan benda berbahan emas dari berbagai daerah di pedalaman Minangkabau. Penemuan Arkeologi lainnya juga terdapat di jalur Sungai Batang Kuantan, Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Batanghari yang mengalir mulai dari pedalaman Minangkabau hingga bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan (Dobbin, 1992: 55-68).

Selain membina hubungan dagang, Kerajaan Tiongkok juga membina

hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, termasuk Kerajaan Pagaruyung di pedalaman Minangkabau. Hubungan tersebut terlihat dari adanya pemberitaan Tiongkok yang menyatakan bahwa Raja Adityawarman pernah mengirim utusan ke Tiongkok sebanyak enam kali selama rentang waktu 1371-1377. Selanjutnya diketahui bahwa H. Puti Alam Naisyah Erma Moeloek dan H. Limbak Tjahaja mengatakan bahwa salah seorang putra Raja Tiongkok dahulunya pernah meminang Bundo Kandug dengan mengirimkan seperangkat pelaminan sebagai ikatan. Rencana perkawinan tersebut sayang tidak jadi terlaksana dikarenakan Putra Raja tersebut mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Minangkabau, namun mahar yang dikirimkan telah diterima oleh Bundo Kandug (Aswar, 1999: 425-434).

Fase kedua, terlihat bahwa etnis Tionghoa secara aktif terlibat dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran bersama dengan orang-orang dari Arab dan India (Asnan, 2007: 43). Pada abad ke-17, etnis Tionghoa telah bermukim di kota Pariaman. Kota tersebut merupakan pemukiman pertama etnis Tionghoa di sekitar kawasan Pantai Barat Sumatera. Tahun 1660 *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), yakni serikat dagang yang dimiliki Belanda menjadikan Padang sebagai pusat ekonomi dan politik. Pedagang Tionghoa dan VOC menjalin kontak dagang dengan penduduk Padang yang pada mulanya juga merupakan para pedagang dari daerah pedalaman.

Peningkatan jumlah etnis Tionghoa yang menetap di Padang pada tahun 1682 menyebabkan VOC mengangkat seorang letnan Tionghoa yang bernama Lie Pit (Erniwati, 2016: 35). Hal ini dilakukan dengan tujuan mengontrol dan mengatur etnis Tionghoa yang berada di Padang. Faktor kemampuan memiliki modal lebih, menyebabkan para pedagang Tionghoa mampu menggeser peran para pialang Minangkabau hingga ke pedalaman. Akibatnya, barang-barang pokok yang diperoleh dari para pengecer di

pasar, bergantung kepada para pedagang Belanda dan Tionghoa (Bond, 1988: 156). Fase inilah yang menjadi jembatan terbinanya relasi dagang antara etnis Tionghoa dengan dengan pedagang Minangkabau, baik di Padang maupun di daerah pedalaman.

Relasi yang terbina kemudian bukan saja dalam aspek perdagangan, melainkan juga dalam hal perkawinan. Etnis Tionghoa yang melakukan perkawinan dengan masyarakat setempat, pada umumnya adalah kaum laki-laki yang datang tidak dengan membawa keluarga dari dataran Tiongkok. Keturunan dari hasil perkawinan campuran etnis ini kemudian melahirkan kelompok Tionghoa yang disebut dengan Tionghoa Peranakan (Lan, 2013: 24; Lohanda, 1993: 11; Noordjanah, 2004: 41).

Fase ketiga, yakni terjadi pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Pada fase ini, etnis Tionghoa datang ke Padang untuk bekerja menjadi kuli di perkebunan dan pertambangan yang dibuka oleh Pemerintah Hindia Belanda, salah satunya adalah pembukaan Tambang Batu Bara Ombilin di Sawahlunto. Mereka datang secara berkelompok dengan sistem kuli kontrak. Sebelumnya, yang bekerja di pertambangan tersebut adalah kuli dari kelompok narapidana, kuli bebas, dan kuli lepas. Melalui Departemen Kehakiman, Pemerintah Hindia Belanda menugaskan para narapidana dari penjara-penjara di Batavia (terutama dari Glodok dan Cipinang) untuk menjadi buruh paksa di Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (Erman, 2005: 73-75).

Pengiriman buruh paksa ke Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto dimulai pada awal tahun 1898 dengan jumlah penambang 2.405 orang. Pada bulan Mei 1898, pengiriman buruh menurun menjadi 1.130 orang. Beberapa faktor penyebab adalah meninggal karena sakit, melarikan diri, dan lainnya. Krisis tenaga kerja tambang akhirnya terjadi pada tahun berikutnya. Akibatnya Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan buruh kontrak asal Tiongkok dengan Surat

Keputusan Gubernur Jendral yang memberi izin pengerahan orang-orang Tionghoa untuk bekerja di pertambangan.

Pada permulaan tahun 1900, kuli kontrak yang didatangkan adalah sebanyak 600 orang yang didatangkan dari pusat pasar tenaga kerja Tionghoa di Singapura. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan kemudian yang layak untuk menjadi pekerja di Pertambangan Batu Bara Ombilin Sawahlunto hanya 464 orang. Selanjutnya pada tahun 1900, kuli kontrak kembali didatangkan dari Singapura sebanyak 136 orang. Penurunan jumlah kuli yang didatangkan disebabkan karena biaya kontrak kuli yang tinggi, sehingga pimpinan perusahaan kemudian mendatangkan buruh dari Jawa. Perekrutan kuli dari Jawa dilakukan melalui kantor tenaga kerja seperti *Algemeen Delisch Emgratie Kantoor* (ADEK) dari Semarang, Betawi, dan Surabaya (Erman, 2005: 73-75).

Menurut Victor Purcell, fase terakhir (fase ketiga) kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara berlangsung di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Migrasi besar-besaran yang dilakukan pada waktu itu dilakukan oleh kaum laki-laki dengan membawa serta istri dan keluarganya, sehingga terjadi proses pemindahan potensi, kebudayaan, serta kekayaan mereka ke wilayah yang dituju. Kelompok yang datang pada periode ini disebut dengan "*totok* atau *singkeh*" (tamu baru). Kelompok *totok* pada umumnya masih teguh mempertahankan kebudayaan nenek moyang mereka ke generasi berikutnya. Kelompok ini digambarkan sebagai generasi pertama dan terus berlanjut, karena tidak ada keinginan dari mereka untuk melakukan perkawinan campuran dengan penduduk lokal serta masih fasih berbicara dengan bahasanya masing-masing, yakni bahasa Hokkian dan beberapa bahasa lainnya dari provinsi yang ada di Tiongkok. (Yang, 2005: XXI; Hamdani, 2012: 68-69).

Imigran Tionghoa yang datang ke Padang pada umumnya memiliki mata pencaharian yang tidak sama. Hal itu

dipengaruhi oleh daerah asal di Tiongkok serta kekayaan alam yang dimiliki oleh Padang dan daerah pedalaman Minangkabau. Pendatang Tiongkok yang berasal dari Hokkian, pada umumnya bekerja sebagai pedagang, pengumpul kredit, dan sebagainya. Pendatang dari daerah Hupek, bekerja sebagai tukang gigi, sedangkan pendatang dari daerah Kongfu banyak bekerja di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, tukang kayu, dan pedagang kelontong (Yang, 2005: XXI).

3. Dinamika Kehidupan Etnis Tionghoa dalam Politik Kolonial

Keberadaan etnis Tionghoa yang datang secara bertahap seperti yang digambarkan di atas ikut memengaruhi pola pemukiman yang terbentuk di Padang. Etnis Tionghoa cenderung hidup secara berkelompok. Mulanya para pendatang Tionghoa tinggal di sekitar kawasan Sungai Batang Arau yang waktu itu ramai dikunjungi oleh para pedagang, baik pedagang asing maupun pedagang Minangkabau dari daerah pedalaman. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan VOC dan dijadikannya Padang sebagai pusat pemerintahan Belanda di Sumatera Barat mendorong Padang berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Hal ini ikut memengaruhi meningkatnya para pendatang, termasuk jumlah etnis Tionghoa ke Padang. Untuk mengatur penduduk penduduk yang semakin padat, kemudian pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan khusus terkait dengan penduduk. Tatanan pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk kolonial ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok Eropa, Timur Asing (Tionghoa, Arab, India) dan Pribumi. Penetapan kelompok masyarakat yang bersifat horizontal ini memengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, seperti status kewargaan dan hukum yang diatur berdasarkan *staatsblad* tahun 1847 No. 23.

Etnis Tionghoa yang termasuk ke dalam kelompok Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) memiliki pemukiman khusus (*Chinese Camp*) yang dilengkapi dengan *Chinese Besture* (*Letenan, Kapiten, Mayor* serta *Opsir*). *Chinese Camp* yang ada di Padang dikenal dengan Kampung Pondok (1854). Pemukiman ini dilengkapi dengan berbagai komponen, seperti Klenteng See Hien Kiong sebagai tempat ibadah, rumah marga dan perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman Hok Tek Tong (1863) dan Heng Beng Tong (1867) sebagai sarana sosial dan budaya, serta Pasar Tanah Kongsu sebagai sarana ekonomi.

Kompleksitas sarana dan prasarana pemukiman etnis Tionghoa menyebabkan secara komunitas, etnis ini berada terpisah dari etnis lainnya. Hal ini disebabkan karena etnis lainnya juga bermukim dalam perkampungan di kawasan khusus sesuai dengan etnis masing-masing (Kampung Nias, Kampung Jawa, Kampung Keling/India). Akibatnya secara sosial, interaksi dan relasi yang terbangun di antara masing-masing etnis sangat terbatas, kecuali melalui relasi dagang.

4. Identitas Etnis Tionghoa Padang

Sebagai kelompok etnis yang berada di bawah sistem politik Pemerintah Hindia Belanda, etnis Tionghoa berada di lingkungan yang terpisah dengan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini mengakibatkan etnis Tionghoa berada di dalam komunitas yang homogen sehingga secara etnisitas tidak mengalami pembauran yang signifikan. Meskipun secara ekonomi terbina relasi yang saling menguntungkan antara pedagang Tionghoa dengan pedagang Minangkabau dan pedagang lainnya, namun sistem perkampungan dan faktor keyakinan ikut memengaruhi pembentukan identitas etnis Tionghoa di Padang.

Konsentrasi pemukiman etnis Tionghoa di Kampung Pondok menyebabkan beberapa unsur ke-Tionghoa-an yang terlihat melalui

bangunan serta berkembangnya kebudayaan Tionghoa yang diwarisi melalui Klenteng See Hien Kiong, rumah marga Lie dan Kwee (1878), Gho (1888), Tan (1888), Keluarga (1870), Huang (1824), Tjoa & Kwa (1831) serta perkumpulan sosial, budaya dan pemakaman HTT (1863) dan HBT (1867). Keberadaan komponen masyarakat inilah yang menjadi wadah bagi etnis Tionghoa di Padang dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Tionghoa sebagai identitas mereka. Komponen masyarakat di atas secara aktif berperan sebagai sarana bagi anggotanya untuk melaksanakan upacara sembahyang kepada leluhur masing-masing. Keyakinan kepada leluhur yang dihormati ditanamkan melalui upacara ritual keagamaan yang secara rutin diselenggarakan oleh masing-masing lembaga yang pada umumnya telah berdiri sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun secara lahir etnis Tionghoa telah tinggal di Padang secara turun temurun, namun politik kolonial dan ruang Padang yang didominasi oleh etnis Minangkabau yang identik dengan adat istiadatnya yang kuat serta agama Islam menyebabkan etnis Tionghoa memiliki ruang untuk tetap menjadikan kebudayaan leluhur sebagai identitas mereka. Hal ini juga ikut memengaruhi orientasi politik etnis Tionghoa yang cenderung ke Daratan Tiongkok, sehingga menghasilkan identitas historis dengan penekanan nilai-nilai keluarga, asal usul marga di perantauan, loyalitas sub etnis, serta simbol-simbol yang akan menopang ke-Tionghoa-an mereka di perantauan (Cushman & Gungwu, 1991: 2-3).

Berikut adalah penjabaran identitas yang melekat di dalam diri etnis Tionghoa Padang berdasarkan analisis identitas etnis dari Wang Gungwu :

a. Identitas Historis

Kemanapun etnis Tionghoa merantau cenderung membawa dan mewariskan kebudayaan leluhur, meskipun mereka bukanlah kelompok yang homogen karena pada dasarnya etnis Tionghoa

memiliki kebudayaan serta asal usul yang berbeda dari Daratan Tionghoa. Pluralitas terlihat kentara dari perbedaan marga dan daerah asal (Hokkian, Khek, Canton, Kongfu dsb) di Tiongkok menjadi faktor adanya keberagaman bahasa dan budaya yang dikembangkan.

Walaupun memiliki banyak ketidaksamaan tersebut, namun etnis Tionghoa di Padang disatukan oleh adanya rasa senasib sebagai perantau dari Tiongkok dan selalu menjunjung tinggi serta menghormati leluhur. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya kesadaran akan identitas historis (Coppel, 1994: 31).

Adanya keyakinan untuk menghormati roh leluhur mendorong masing-masing kelompok etnis Tionghoa Padang membina hubungan kekerabatan melalui tradisi berserikat (*hui*) dan bekerjasama (*kongsi*) (Comber, 1959: 9). Kedua tradisi ini menjadi faktor berdirinya banyak kongsi-kongsi etnis Tionghoa di Padang, seperti kongsi marga, kongsi dagang, kongsi sosial budaya dan pemakaman serta kongsi lainnya yang didirikan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Pada mulanya kongsi-kongsi yang ada dikelola secara konvensional, namun setelah kongsi-kongsi tersebut beraktivitas secara bebas, kemudian Pemerintah Hindia Belanda melakukan strukturisasi dengan meregistrasinya menjadi organisasi modern pada tahun 1894 (*Brief Gouvernements Secretaris No. 2775, Buitenzorg 31 Desember 1895; Departement van Justice Ochtendrapport van 5 September 1895 No. 1*).

Identitas ke-Tionghoa-an yang ditanamkan melalui pewarisan nilai-nilai leluhur dan simbol-simbol budaya yang digunakan dalam menjalankan ritual keyakinan di kongsi menjadi sarana dalam menjaga identitas di perantauan (Cushman & Gungwu, 1991: 3-7). Melalui pewarisan ingatan kolektif secara lisan dari generasi ke generasi, identitas ini dapat dipertahankan dan diwariskan ke keturunan selanjutnya. Dalam

menjalankannya, bukan berarti tidak ada pembelokan yang terjadi. Maksudnya, terkadang ada beberapa ritual yang memiliki kesamaan fungsi, namun dalam tataran praktis, ada yang melakukannya berbeda. Misalnya, pesta memasak daging babi tidak mungkin dilakukan di tengah masyarakat Padang yang mayoritasnya etnis Minangkabau adalah muslim. Sebagai pengganti digunakan makanan lain yang akan disediakan untuk menjaga kemeriahan pesta..

Berdasarkan fase kedatangan orang-orang Tionghoa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka etnis Tionghoa yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama *peranakan* dan *totok*. *Tionghoa Peranakan* adalah orang Tionghoa yang telah melakukan perkawinan campuran dengan penduduk setempat. Kelompok ini adalah keturunan dari orang-orang Tionghoa yang datang pada fase pertama dan kedua. Lalu, kelompok kedua dinamakan dengan *Tionghoa Totok*, yaitu orang Tionghoa yang datang di akhir masa masa Pemerintah Hindia Belanda serta masih melaksanakan kebudayaan leluhur dan berbahasa daerah asal. Kelompok ini datang setelah Indonesia merdeka dan membawa keluarga.

Selain waktu kedatangan yang berbeda pada kedua kelompok tersebut, budaya dan bahasa juga menjadi poin penting yang menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar tidak sepenuhnya memiliki persamaan. Meskipun kebudayaan leluhur sama-sama diwarisi, namun penerapannya di tanah perantauan akan berbeda. Kelompok Tionghoa Peranakan tidak bisa lagi berbahasa daerah asal Tiongkok, namun mereka tetap menjalani ritual-ritual keagamaan dan budaya seperti yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Identitas yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang Tionghoa, tidak bisa begitu saja dihilangkan. Ciri fisik, simbol-simbol, serta kebudayaan masih dilaksanakan dan hal ini menjadi salah satu media yang

menyatukan etnis Tionghoa Totok dan Peranakan.

b. Identitas Budaya

Sistem pemukiman yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap penduduk menyebabkan etnis Tionghoa hidup berkelompok dalam suatu *kawasan pecinan* yang dinamakan *Kampung Pondok*. Sistem permukiman menyebabkan etnis Tionghoa memiliki ruang untuk memelihara sistem kekerabatan yang dimulai dari marga hingga kesamaan keyakinan kepada leluhur..

Marga (*She*) atau nama keluarga merupakan penanda identitas dari mana seseorang berasal. Akibatnya, marga menjadi sebuah identitas genetik dalam keturunan etnis Tionghoa. Jika dalam budaya barat nama marga diletakkan di belakang nama, sebaliknya etnis Tionghoa meletakkan nama marga di depan nama mereka. Hal ini disebabkan karena marga tidak saja menjadi identitas diri, tetapi juga menjadi salah satu pengelompokan untuk identitas budaya bagi etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa Padang berasal dari berbagai marga, tetapi yang memiliki lembaga resmi berupa rumah marga seperti Lee/Lie & Kweek (1878), marga Gouw/Goh/Go (1888), marga Tan (1888), marga Huang/Oey/Ng/Oei (1924), marga Tjoa (1931), dan marga Lim (1870) (Erniwati 2016: 77-90).

Marga Lie (*Lee*) adalah marga yang anggotanya paling banyak dan tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Perkumpulan Marga Lie (*Long Se Tong*) Padang didirikan pada tahun 1878, namun baru menjadi lembaga resmi tahun 1909 berdasarkan Register der Besluiten Gouverneur General Hindia Belanda, 1909. Marga Lie bergabung dengan marga Kwee sehingga di Padang dikenal dengan nama marga Lie-Kwee. Penggabungan ini karena mereka memiliki nenek moyang yang sama-sama berasal dari Hokkian, Kampung Leng Tiam. Long Se Tong didirikan secara resmi pada tanggal 21 September 1909 setelah akte pendirian

diajukan oleh beberapa tokoh marga Lie, yakni Lie Lian Seng, Lie Sim Tjoan, dan Lie Pang Ko. Atas persetujuan sekretaris Gubernur Jendral Hindia Belanda de Graef, pendirian Long Se Tong berhasil dilakukan dengan presiden pertamanya Lie Lian Seng (*Belsuit* No. 38 tanggal 21 September 1909)

Marga Tan (*Chen*), berasal dari Negeri Tan di Provinsi Holm, Kabupaten Huai Yang (saat ini bernama Tan Chou). Negeri Tan adalah hadiah yang diberikan Raja Tjiu Bu kepada Raja Sun, yang merupakan keturunan Chong Hoa karena telah berjasa terhadap negara. Puncak kejayaan Kerajaan Tang tercapai saat Tan Goang Kong menjadi penglima perang. Atas jasanya tersebut, Tan Goang Kong mendapatkan gelar kehormatan Kai Tjiang Seng Ong. Sejak saat itu, hari kelahiran Tan Goan Kong dirayakan, yakni setiap tanggal 10 Februari saat musim semi.

Pendirian Himpunan Keluarga Tan dilaksanakan untuk menggalang kerjasama dan persaudaraan. Berawal di rumah Cinang Tan Siang di Muara Padang disepakati didirikan Himpunan Keluarga Tan sejak 22 Maret 1888 dan diresmikan oleh Seri Paduka Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Cipanas tahun 1918 (*Belsuit* No. 2 tanggal 26 Agustus 1918). Himpunan Keluarga Tan mengadakan upacara sembahyang besar dua kali setahun, yakni *She Jiet Tjo Ong* pada *Jie Gwee Cap Go* dan *Tang Tjiek*. Upacara bulanan juga dilaksanakan, yakni setiap *Ce It* (bulan 1) dan *Cap Go* (bulan 5). Jumlah Anggota Marga Tan di Padang saat ini lebih kurang 325 orang, dan sebagian berdomisili di luar Padang.

Selanjutnya Perkumpulan Marga Huang, yang diresmikan pada tahun 1924. Penghormatan yang dilakukan marga ini adalah kepada *Koan Te Koen* dan leluhur Laoco *Oei Hoei Ho*. Setiap tahun Perkumpulan Marga Huang melakukan sembahyang sebagai peringatan perayaan ulang tahun Laoco *Oei Hoei Ho* pada bulan ke-3 hari ke-28 setiap penanggalan Imlek. Selain itu, yang rutin dilaksanakan adalah sembahyang *Ce-it* dan *Cap Go*, dan

sembahyang hari *Tong Cup Pia* (Kue Pia). Perkumpulan Marga Huang sering mengadakan pertemuan, baik tingkat nasional maupun internasional yang langsung dikoordinir oleh Forum Komunikasi Keluarga Besar Perkumpulan Marga Huang yang berpusat di Jakarta.

Marga Tjoa atau *Tjee Jang Tong* (*She Tjoa*) yang didirikan di Padang pada 3 September 1931, dengan *President* pertama yang bernama Tjoa Ka Toan, dan *Vice-President* Tjoa Tjeng Gie. Tujuan perkumpulan ini didirikan adalah untuk memajukan pergaulan di antara bangsa Tionghoa (*She Tjoa*) serta memberikan bantuan kepada yang mendapatkan musibah, perayaan pesta, serta penguburan berdasarkan aturan. Sedekah dan sembahyang agama yang disandingkan dengan arak-arakan atas penghormatan kepada orang yang sudah meninggal juga menjadi kegiatan rumah marga (*Statuaten* dari *Vereeniging Tjee Jang Tong* Padang, 1930).

Himpunan Keluarga Lim (*Kioe Liong Tong*) Padang yang didirikan pada tanggal 28 Maret 1870 dengan *President* pertama, Lim Ma Hie dan *Vice-President* Lim Eng Tjiang (Javanese Courant no, 86, 1920). Sekretariat Himpunan Keluarga Lim saat ini berada di Jl. Pulau Karam No. 68 Padang. Hingga tahun 2013, anggota Himpunan Keluarga Lim terdiri atas 350 orang laki-laki dan 150 anggota perempuan (Laporan Kegiatan Himpunan Keluarga Lim, 14 Maret 2013). Marga ini menjadikan Ma Tjo Po (*Ma Zu*), yakni dewi laut sebagai leluhur yang dihormati. Tujuan pembentukan perkumpulan ini adalah untuk membantu sesama marga Lim yang terkena musibah serta melaksanakan kegiatan di bidang sosial, kesenian dan budaya.

Kemudian Himpunan Keluarga Gho (*Yang Leng Tong*) Padang yang berdiri pada 14 Januari 1888 (tahun Imlek 2439) dengan ketua pertama yang bernama Gho Tjong. Himpunan Keluarga diresmikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 Desember 1917, yang bertepatan dengan hari kelahiran Shejit

Toapekongnya *Gho Kui Cak*. Himpunan Keluarga Gho melakukan sembahyan kepada Ho Tek Peng Djin dan Kuan Tek Ya (*Kuan Kong*). Himpunan Keluarga Go terkenal dengan orang pintar, paling hebat dan menepati janji dengan baik. Salah seorang Marga Gho pernah menjadi dokter kepercayaan Raja dengan gelar Ho Seng Thai Tee dengan nama asli Gho Chin Djin. Bahkan Kong Hu Tzu pernah memuji orang bermarga Gho dengan predikat baik (*Belsuit* No. 41, 1918).

Di antara banyak faktor yang membentuk identitas budaya adalah kepercayaan, rasa aman, dan pola perilaku. Selain ketiga faktor tersebut, proses asimilasi dan akulturasi seiring perjalanan waktu juga memengaruhi identitas budaya mereka. Proses pembentukan identitas budaya tersebut, bisa juga terjadi secara tidak sengaja melalui pencarian, resistensi, separatisme, dan integrasi.

Identitas kelompok marga terjaga dikarenakan setiap marga mendirikan perkumpulan untuk menunjukkan perbedaan masing-masingnya. Kebudayaan yang berbeda itulah yang menjadi penciri sebagai penunjuk identitas mereka. Perkumpulan akan dibuat jika sudah memiliki banyak anggota. Dalam perkumpulan tersebut, setiap kelompok marga akan melaksanakan upacara sembahyang untuk menghormati leluhur dan melaksanakan beragam perayaan sebagai proses pewarisan kebudayaan leluhur. Misalnya, setiap perayaan tahun baru Imlek (*Cue-it*), tiap marga akan melaksanakan upacara sembahyang di rumah marga dan di perkumpulan sosial budaya pemakaman masing-masing (HBT dan HTT). Perayaan upacara disertai dengan kemeriahan parade Barongsai dan atraksi budaya lainnya.

Selain perkumpulan keluarga, etnis Tionghoa Padang juga memiliki kelompok sosial, budaya dan pemakaman yang heterogen. Perkumpulan tersebut adalah Hok Tek Tong (HTT) dan Heng Beng Tong (HBT). HTT berdiri pada tahun 1863 dengan Tuako pertama Lie Kaw Keng (*Pengurus Himpunan Tjinta Teman*, 1987:

3). HBT berdiri pada tahun 1876 dengan Tuako pertama Oei A King (*Huishoudelijk Reglement, 1924; Reglement Peraturan, 1899; Belsuit No. 62, 1895*). Meskipun pendirian perkumpulan ini sudah lama, namun peresmian yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda baru dilaksanakan pada tahun 1895. Perkumpulan etnis Tionghoa mulai terstruktur dan terorganisir dengan baik setelah Pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan terhadap perkumpulan etnis Tionghoa Padang pada tahun 1894 (*Staatsblad No. 79: 1895; Staatblad No. 129: 1917*).

Keanggotaan HTT dan HBT terdiri atas laki-laki Tionghoa dengan panggilan *Hiati*. Syarat keanggotaan untuk tergabung dalam perkumpulan ini adalah minimal sudah berusia 16 tahun yang tercantum pada pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HBT dan HTT (*Huishoudelijk Reglement, 1924; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman, 1987*).

Hampir semua etnis Tionghoa tergabung ke dalam salah satu perkumpulan ini. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena etnis Tionghoa yang tinggal di Padang secara sosial dan budaya dipengaruhi oleh lingkungan setempat, serta faktor ekonomi dengan beragam alasan lainnya. Oleh karena itu, tergabung ke dalam salah satu perkumpulan antara HTT dan HBT haruslah dilakukan oleh etnis Tionghoa Padang.

Latar sejarah, budaya, wilayah domisili, dan karakteristik mereka memengaruhi bagaimana etnis Tionghoa memposisikan diri dalam konteks identitas budaya yang dikembangkan. Atas dasar kesadaran kolektif pada identitas historis, etnis Tionghoa mampu berkembang serta mempertahankan kebudayaan dari tanah leluhur, meskipun sudah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan dan waktu.

c. Identitas Nasional

Identitas nasional yang dimaksud di sini adalah kebangkitan identitas etnis Tionghoa terhadap kebangkitan nasionalisme Tiongkok. Penyebaran identitas ini terjadi tidak hanya pada individu semata, namun juga kepada kelompok. Situasi politik dalam negeri Tiongkok ini ternyata memengaruhi sebagian etnis Tionghoa yang tinggal di perantauan, termasuk yang tinggal di Padang. Hal ini dipengaruhi oleh gencarnya propaganda yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok melalui berbagai cara, di antaranya adalah melalui dispora etnis Tionghoa keluar dari dataran Tiongkok, propaganda yang dilakukan organisasi sosial pendidikan Tiog Hwa Hwe Kwan (THHK) yang didirikan di Padang pada tahun 1907 oleh Gho Goan Tee (*Dokumen THHK, 1963*).

THHK memberikan pelajaran kepada para siswa dengan mengembangkan bahasa Mandarin. Selain itu, pelajaran yang diberikan adalah tentang bagaimana kebesaran dan keagungan para leluhur serta beberapa pelajaran lain yang berkaitan dengan nilai-nilai *ke-Tionghoa-an*. Penanaman rasa malu karena tiak mengetahui kebudayaan dan tidak bisa berbahasa Tiongkok juga diberikan.

Gerakan nasionalis yang dikumandangkan Dr. Sun Yat Sen mendapatkan dukungan dari kalangan etnis Tionghoa Padang. Hal itu terlihat dari keikutsertaan mereka dalam propaganda dengan memuat foto Dr. Sun Yat Sen di koran lokal, penggalangan dana secara terorganisir oleh perkumpulan-perkumpulan etnis Tionghoa yang ada di Padang, pengibaran bendera Tiongkok, serta melaksanakan upacara penghormatan kepada Dr. Sun Yat Sen. Penggalangan dana dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pameran ataupun bazar yang juga dilakukan hingga ke wilayah pedalaman Sumatera Barat seperti Padangpanjang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.

Selanjutnya, propaganda yang dilakukan Kuo Min Tang cabang Padang

adalah dengan mengadakan upacara peringatan insiden Lu Kai Vhian, pengangkatan Dr. Sun Yat Sen sebagai Presiden Republik Tiongkok, dan peringatan kematian Dr. Sun Yat Sen setiap tanggal 20 Maret dengan mengibarkan bendera setengah tiang di depan rumah dan perkumpulan sosial budaya dan pemakaman Tionghoa Padang (*Politik Verslag Sumatra Westkust*, 1931: 13).

d. Identitas Ganda

Identitas ganda yang dimaksud Wang Gungwu adalah mengidentifikasi diri dengan wilayah tempat tinggal secara sadar sebagai orang Tionghoa. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud adalah Hindia Belanda dengan peraturan-peraturan yang mengikat di dalamnya. Stratifikasi masyarakat yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda menyebabkan etnis Tionghoa memiliki kelompok etnis sendiri dan terpisah dari kelompok etnis lainnya. Meskipun secara sosial etnis Tionghoa memiliki komunitas tersendiri, namun hal tersebut membuat etnis Tionghoa menjadi terasing di antara lingkungan domisilinya, tidak hanya secara psikologis, namun juga ideologis.

Secara psikologis, posisi sebagai kelompok Timur Asing dengan berbagai peraturan hukum yang mengikat menyebabkan etnis Tionghoa memiliki keterbatasan dan keharusan memenuhi aturan yang berlaku (Sugiasuti, 2003: 185-381). Hal ini menyebabkan secara psikologis etnis Tionghoa berada dalam kontrol dan tekanan politik kolonial. Situasi ini mengakibatkan etnis Tionghoa yang pada dasarnya masih memiliki identitas budaya, identitas historis dan identitas nasional yakni berorientasi kepada leluhur (Daratan Tiongkok) tidak memiliki keterikatan emosional dengan lingkungan tempat tinggal, meskipun secara sosial, ekonomi, dan politik mereka berada di bawah Pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun dalam perjalanan waktu kemudian pelestarian budaya leluhur mengalami fluktuasi, tergantung situasi

politik, baik Pemerintah Hindia Belanda maupun politik luar negeri Tiongkok. Hal ini terlihat dari respon Pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi perkembangan Tionghoa Hoa Hwe Koan yang mengembangkan ideologi melalui jalur pendidikan. Untuk menghambat agar Tionghoa Hoa Hwe Koan tidak mengakar di kalangan etnis Tionghoa, maka Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Holland Chinessche School* (HCS) pada tanggal 1 Mei 1908. Tujuan lain pendirian HCS juga merupakan tanggapan Pemerintah Hindia Belanda atas permintaan beberapa orang etnis Tionghoa agar memperoleh pendidikan Eropa untuk anak-anak mereka sesuai pasal 14 dan menerapkan pola pemisahan dengan penduduk lokal (Coppel, 1994: 40; Willmott, 1960: 106-107; Studio, 2001: 76).

Berbagai strategi dilaksanakan Pemerintah Hindia Belanda untuk berusaha memperlihatkan simpati kepada etnis Tionghoa dengan kesan bahwa pemerintah memiliki perhatian lebih terhadap mereka. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Hindia Belanda masih membutuhkan etnis Tionghoa untuk kepentingan praktis dalam menjalankan sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Namun kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang HCS hanya berpengaruh pada sebagian kecil etnis Tionghoa saja karena gerakan nasionalisme Tiongkok telah mengakar di kalangan etnis Tionghoa. Fenomena ini juga terjadi di kalangan etnis Tionghoa Padang. Bahkan awal abad ke-20 etnis Tionghoa Padang terbagi atas tiga kelompok yaitu pertama beberapa orang Tionghoa yang tergabung dalam struktur Pemerintah Hindia Belanda dan mendapat pendidikan Barat akan berorientasi ke Barat meskipun dalam keseharian masih melaksanakan kebudayaan leluhur. Kedua, kelompok yang masih mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur sebagai bagian dari identitas historis, budaya dan nasional (Tiongkok) akan berorientasi ke Tiongkok. Ketiga, kelompok yang berorientasi kepada Tiongkok dan Pemerintah Hindia Belanda.

Ketiga kelompok ini sering sulit untuk membedakannya dikarenakan loyalitas ganda yang diperankan berujung pada identitas ganda yang terjustifikasi pada diri mereka. Wujud dari identitas ganda tersebut bisa dilihat pada penggunaan simbol-simbol yang menggambarkan ke-Tionghoa-an dan simbol-simbol lokalitas yang terwujud sebagai hasil pendidikan barat, tetapi juga sebagai akibat ketidakmampuan etnis Tionghoa Padang melepaskan diri dari politik Pemerintah Hindia Belanda dan politik luar negeri Tiongkok.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan identitas etnis Tionghoa di Padang masa Pemerintah Hindia Belanda dipengaruhi oleh: Pertama, pemberlakuan sistem pemukiman tahun 1852 menyebabkan terkonsentrasinya kelompok etnis tersebut di kampung Pondok yang dilengkapi dengan berbagai komponen masyarakat. Hal tersebut menyebabkan proses pewarisan kebudayaan leluhur berjalan seiring waktu.

Pola pemukiman yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda terhadap etnis Tionghoa di Padang memberikan ruang kepada mereka untuk tetap mengembangkan identitas historis dan budaya di dalam kehidupannya. Lokalitas tempat tinggal dan kolektifitas memori yang dimiliki bersama menjadi ikatan untuk tetap pada sebuah persatuan dan kebersamaan dalam menjalani hidup di tanah perantauan. Hal ini terbentuk dan diperankan oleh komponen-komponen masyarakat, terutama lembaga-lembaga marga, perkumpulan dan tempat ibadah.

Perubahan terjadi sejak 1900, dimana kebangkitan nasionalis Tiongkok juga memengaruhi Tionghoa yang ada di perantauan. Gerakan nasionalis Dr. Sun Yat Sen dan THHK yang mendapat dukungan dari kelompok marga dan perkumpulan etnis Tionghoa yang ada di Padang berperan besar dalam memperkuat identitas ke-Tionghoa-an pada periode ini.

Dukungan secara moril maupun materi yang diberikan oleh etnis Tionghoa Padang menandakan identitas nasional Tiongkok masih mengakar kuat di kalangan etnis ini. Meskipun kemudian untuk menghadapi gerakan tersebut politik Pemerintah Hindia Belanda mulai bereaksi dan mengakalinya dengan mengeluarkan kebijakan penyetaraan status warga negara serta memperkenalkan pola pendidikan Barat, namun tidak berhasil mengembalikan orientasi etnis Tionghoa Padang. Akibatnya etnis Tionghoa terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kelompok yang teguh mempertahankan identitas nasional Tiongkok dan kedua kelompok yang memiliki identitas ganda (mempertahankan ke-Tionghoa-an yang kebarat-baratan).

Kedua, pemberlakuan klasifikasi sosial. Pengelompokan ini membawa etnis Tionghoa dan etnis lainnya masing-masing memiliki sistem kepemimpinan tersendiri dengan nama *bestuur* (Mayor, Kapitan dan Letnan, serta pendukung *bestuur* lain seperti *Masteer* dan *Wijkmasteer*. Implikasi dari kebijakan ini adalah penempatan etnis Tionghoa dalam kelas sosial tersendiri. Sistem tersebut juga tidak mengakomodir etnis Tionghoa untuk melakukan pembauran maupun akulturasi dengan masyarakat lainnya. Sistem tersebut dibuat untuk menciptakan batasan-batasan etnis yang jelas dalam masyarakat kolonial. Hal tersebut juga lah yang membuat etnis Tionghoa tetap bertahan dengan identitas historis dan budaya leluhurnya.

DAFTAR SUMBER

1. Dokumen

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman Padang, Padang : Pengurus Himpunan Tjinta Teman Padang, 12 Juni 1987.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman, Padang 12 Juni 1987.

Besluit No. 2 tanggal 26 Agustus 1918.

Besluit No. 38 tanggal 21 September 1909.

- Besluit* No. 41 tahun 1918
- Besluit* tanggal 21 Juli 1918, No. 41, bundle Algemeen Secretarie, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Besluit*, No.62 tanggal 31 Desember 1895.
- Brief Gouvernements Secretaris No. 2775, Buitenzorg 31 Desember 1895; Departement van Justice Ochtendrapport van 5 September 1895 No. 1).*
- Dokumen THHK Padang: Salinan No. 3, perjanjian pinjam pakai, 16 Agustus 1963.
- Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang 4 Juni 1924.
- Laporan Kegiatan Himpunan Keluarga Lim (*Kioe Liong Tong*) Padang, 14 Maret 2013.
- Netscheer, E. 1881. *Padang In Het Laatste Der XVIII*. Batavia: Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, Verhandelingen Van Het Bataviasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen 41.
- Politik verslag Sumatera's Westkust. No.122/8 tahun 1862.
- Politik Verslag Sumatra Westkust, Kwartal II tahun 1931, Mr. No 208/1931 (rahasia).
- Reglement Peratoeran dari Kongtie Heng Beng Tong, Fort de Kock 17 April 1899.
- Staadblad*, No.25 Tahun 1815.
- Staadblad*, No.37 Tahun 1835.
- Staadblad*, No.57 Tahun 1866.
- Staadblad* No. 23 Tahun 1847.
- Staatsblad* No. 129 Tahun 1917.
- Staatsblad* No. 79 Tahun 1895.
- Statuten* dari *Vereeniging Tjee Jang Tong* Padang tahun 1930.
- Statuten* van de vereeniging "Kioe Liong Tong" te Padang (Sumatra's Westkust), *Javasche Courant*, No. 86 tahun 1920.
- The Netherlands Indies "A Review of The Country It's Economics and Commerce" Vol III 1935 Publisher: 6 Kolff & Co. Batavia, Java, N, 1 Issued by the *Departement of Economic Affairs*, Editorial Committee Press: Schoolwey 8 Batavia c (JAVA).
- ## 2. Koran
- Javasche Courant* No. 86 Tahun 1920.
Padang Ekspres, 8 Februari 2009.
- ## 3. Buku
- NN. 1989. *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia*. Padang: Sumatera Offset.
- Asnan, Gusti. 2007.
Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera. Yogyakarta: Ombak.
- Andjarwati Noordjanah. 2004.
Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946) Semarang: Mesiass.
- Barth, Fredrik (ed). 1969.
Ethnic Groups and Boundaries, Boston: Little Brown.
- Colombijn, Freek. 2006.
Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad ke 20 dan Penggunaan Ruang Kota. Yogyakarta: Ombak.
- Comber, Leon. 2009.
The Triads: Chinese Secret Societies in Malaya: A Survey of The Triad Society from 1800-190. Singapore: Singapore Heritage Society
- Coppel, Charles A. 1994.
Tionghoa Indonesia dalam Krisis, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cushman, Jeniffer & Gungwu, Wang. 1991.
Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dobbin, Christine. 1992.
Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847. Jakarta: INIS.
- Erman, Erwiza. 2005.
Membaranya Batubara : Konflik Kelas dan Etnik Ombilin- Sawahlunto-Sumatera Barat 1892-1996. Depok: Desantara Utama.
- Erniwati. "Pariaman (Saat) Tionghoa Pariaman". Dalam A. Budi Susanto (ed.). 2007. *Masih(kah) Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

- _____. 2007.
Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat. Yogyakarta: Ombak.
- _____. 2016.
140 Tahun Heng Beng Tong : Sejarah Perkumpulan Tionghoa 1876 – 2016. Depok: Komunitas Bambu.
- Hamdani, Nasrul. 2012. *Komunitas Cina di Medan: dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*. LIPI Press: Jakarta.
- Laksmi Studio. Tanpa tahun.
Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK/Pa Hoa, Jakarta: Yayasan Pancaran Hidup.
- Lan, Nio Joe. 2013.
Peradaban Tionghoa Selayang Pandang. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lee, Oey Hong. 1959.
Naga Bangkit: Kisah Kemenangan Mao Tse Tung. Djakarta: Lucky.
- Lohanda, Mona. 1994.
The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942. Jakarta: Djambatan.
- Rustopo. 2007. *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895 – 1998*. Yogyakarta: Ombak.
- Seeger, Elizabeth. 1951. *Sedjarah Tiongkok Selayang Pandang*. Medan: Firma AMKA.
- Thaib. tanpa tahun. *Tiongkok Merah*. Bukittinggi: Nusantara.
- Vleming Jr, J.L. Terj, Bob WidyahartoNo. 1988.
Kongsi & Spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina. Jakarta: PT. Temprint.
- Wang, John. 1987.
Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Willmott, Donald Earl. 1960.
The Chinese Of Semarang: A Changing Minority Community ini Indonesia. New York: Cornell University Press.
- Yang, Twang Peck. 2005.
Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950. Yogyakarta: Niagara.

